BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Cimahi

4.1.1 Sejarah Pemerintah Kota Cimahi

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anyer – Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan (loJi) di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874 – 1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung – Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi.Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staat blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi 4 kecamatan : Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratip (pp no. 29 tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.

Cimahi yang berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif, Cimahi dapat ditingkatkan

statusnya dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Walikota Administratif yang bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Kota Administratif Cimahi dengan luas wilayah keselurahan mencapai 4.025,73 Ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.

Cimahi telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 290.202 jiwa dan pada tahu 2000 meningkat menjadi 352.005 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,12 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan Wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Cimahi.Kota Administratif Cimahi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi.

Secara Geografis Wilayah Kota Administratif Cimahi mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi, industri dan perdagangan, perhubungan serta pendidikan. Kota Administratif mempunyai prospek yang baik bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, wilayah Kota Administratif Cimahi yang meliputi Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan, perlu dibentuk menjadi Kota Cimahi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.

Maka pada tanggal 18 Oktober 2001 dibentuklah Kota Cimahi yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan melalui proses penelitian dari lima perguruan tinggi negeri dan swasta yaitu Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Tekhnologi Bandung (ITB), Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Jend. Ahmad Yani (Unjani). Dimana proses tersebut meneliti tentang persyaratan Daerah Otonom yaitu luas wilayah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk serta kehidupan sosial politik ekonomi dan budaya, dengan demikian Kota Cimahi adalah Daerah Otonom yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

moneter fisikal, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor I tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.

Adapun visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi 2007 - 2012 adalah sebagai berikut :

1) Visi Pemerintah Kota Cimahi

Dengan Iman, Taqwa, Optimi, dan Cerdas. Jadikan Cimahi Kota Maju, Agamis, Nyaman, Tertib, Aman, dan Produktif.

2) Misi Pemerintah Kota Cimahi

a. Meningkatkan sarana perekonomian dan lapangan kerja
b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan
c. Meningkatkan penataan dan penegakan hukum
d. Meningkatkan infrastruktur kota
e. Mengendalikan pembangunan agar berwawasan lingkungan
f. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha

4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Cimahi

Struktur organisasi Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No, 1 Tahun 2011, Perda No. 2 Tahun 2011, Perda No. 3 Tahun 2011, dan Perda No. 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1) Walikota
2) Wakil Walikota
3) Staf Ahli

4) Sekretariat Daerah
5) Sekretariat DPRD
6) RSUD Cibabat
7) Dinas
8) Lembaga Teknis Daerah
9) Satpol PP
10) Kecamatan dan Kelurahan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kota Cimahi.

4.1.3 *Job Description*

1) Dinas Pendidikan

   Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

2) Dinas Kesehatan

   Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang kesehatan.

3) Dinas Tata Kota

   Dinas tata kota yang sekarang berganti nama menjadi dinas pekerjaan umum mempunyai tugas pokok melaksankan sebagian urusan Pemerintah Daerah, di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan.

4) Badan Perencanaan Daerah

Badan perencanaan daerah mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan yang meliputi bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial dan budaya.

5) Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

6) Dinas Lingkungan Hidup

Dinas lingkungan hidup yang sekarang berubah nama menjadi kantor lingkungan hidup mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

7) Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Capil

Dinas kependudukan, pencatatan sipil, sosial, dan tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kependudukan, pencatatan sipil, sosial, tenaga kerja, dan ketransmigrasian.

8) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB)

Badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pelayanan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi bidang

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

9) Dinas Perekonomian dan Koperasi

Dinas koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, dan pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, kebudayaan, dan pariwisata.

10) Dinas Penanaman Modal

Dinas penanaman modal yang sekarang berganti nama menjadi kantor penanaman modal mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang penanaman modal.

11) Badan Kesatuan Bangsa

Badan kesatuan bangsa yang sekarang berganti nama menjadi kantor kesatuan bangsa mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kesatuan bangsa.

12) Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

13) Kecamatan Cimahi Utara

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

14) Kecamatan Cimahi Selatan

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

15) Kantor Kepegawaian Daerah

Kantor kepegawaian daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian daerah yang meliputi bidang perencanaan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan dan mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

4.1.4 Aktivitas Pemerintah Kota Cimahi 2007 - 2012

Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Cimahi tahun 2007 - 2012 , pemerintah Kota Cimahi harus mengembangkan dua strategi pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu strategi internal dan strategi eksternal serta fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Strategi penataan pengelolaan pemerintahan, sebagai strategi internal untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya untuk merealisasikan pembangunan yang benar-benar diorientasikan untuk masyarakat harus diawali dengan penataan internal pemerintahan Kota Cimahi baik dalam konteks penataan organisasi maupun dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Cimahi, penataan tersebut termasuk di dalamnya upaya pengmbangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan

sebagai tulang punggung penggerak pemerintahan dan pembangunan, sehingga diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang optimal. Program pengembangan sumber daya manusia dilakukan dalam upaya turut mendorong pencapaian target IPM baik sektor ekonomi, pendidikan maupun kesehatan sehingga melalui berbagai pendidikan dan latihan serta program pengembangan SDM lainnya diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian IPM Kota Cimahi. Penataan yang dimaksudkan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada tercapainya standar mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih memadai.

2. Strategi pembangunan masyarakat kota yang berkelanjutan merupakan dimensi eksternal yang menempatkan masyarakat Kota Cimahi sebagai subyek pembangunan yang berlangsung di Kota Cimahi. Pembangunan pada dasarnya harus dapat mencapai titik keseimbangan antara kebijakan pemerintah di satu pihak dan harapan masyarakat di pihak yang lain, oleh karena itu upaya untuk senantiasa memberdayakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dilaksanakan melalui pola perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Fokus pembangunan 2007 – 2012 diarahkan untuk mendorong percepatan peningkatan ekonomi kota untuk mendorong peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, pada periode 2003 sampai dengan 2007 telah menunjukkan tingkat kemajuan yang signifikan dibandingkan pada masa sebelum otonomi daerah. Indikasi utama pertumbuhan pembangunan Kota Cimahi dapat dilihat dari kinerja perekonomian Kota Cimahi sampai dengan tahun 2006 ditandai

dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,81%. Peningkatan LPE tahun 2006 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelunnya yang hanya mencapai 4,56%. Kendati demikian secara makro pertumbuhan ekonomi kota yang hanya sebagian saja yang bersumber dari dorongan investasi, sebagian besar dipicu oleh konsumsi domestik. Selain itu indikasi keberhasilan pembangunan ditandai pula dengan meningkatnya indeks kesehatanan pendidikan untuk meningkatkan kinerja pembangunan terutama di dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat Kota Cimahi berdasarkan analisis indeks pembangunan manusia, oleh karena itu kinerja pembangunan 2007-2012 diharapkan dapat mendorong pencapaian kinerja ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8 % pada tahun 2012. Oleh karena itu kegiatan program seluruhnya diarahkan pada dorongan kegiatan ekonomi makro dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi mikro.

4.2 Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 15 responden. Untuk variabel X_1, X_2, dan Y kuesioner diberikan kepada objek yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut :

1) Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	11	73,33%
Perempuan	4	26,67%
Jumlah	**15**	**100%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 11 orang atau sebesar 73,33% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang atau sebesar 26,67%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Hal ini dikarena untuk menjalankan dalam jabatan Kepala Sub. Bagian diharapkan adalah pria karena pria dianggap mampu menjalankan fungsi Kepala Sub. Bagian dengan lebih baik dibandingkan yang dijalankan oleh wanita.

2) Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
31-35 Tahun	0	0%
36-40 Tahun	7	46,67%
>40 Tahun	8	53,33%
Jumlah	**15**	**100 %**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia dibawah 36 - 40 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 46,67%, dan >40 tahun

berjumlah 8 orang atau sebesar 53,33%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia >40 tahun. Hal ini dikarenakan pada tingkat usia >40 adalah merupakan masa yang matang dan produktif untuk menjadi seorang Kepala Sub. Bagian dan menjalankan sebuah penugasan kantor serta sebagai Kepala Sub. Bagian. Pemerintah Kota Cimahi pun mengharapkan para Kepala Sub. Bagian dapat bekerja dengan baik guna meningkatkan mutu pemerintahan.

3) Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
Diploma III	0	0%
Strata I (S1)	12	80%
Strata II (S2)	3	20%
Jumlah	**15**	**100%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 12 orang atau sebesar 80% dan pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 3 orang atau sebesar 20%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1). Hal ini dikarenakan karena Kepala Sub. Bagian menuntut tingkat pendidikan yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan responden dengan tingkat pendidikan S1 lebih banyak bila dibandingkan dengan responden dengan

tingkat pendidikan yang lain. Disamping itu tidak sedikit pula terdapat responden dalam penelitian ini sedang dalam menyelesaikan tingkat pendidikan S2.

4) Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
1– 3 Tahun	0	0%
3 – 5 Tahun	3	20%
>5 Tahun	12	80%
Jumlah	**15**	**100%**

Sumber : Data primer yang telah dolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dengan lama 3 - 5 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 20%, dan responden dengan lama kerja >5 tahun sebanyak 12 orang atau sebesar 80%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak >5 tahun. Hal ini disebabkan karena yang lamanya bekerja >5 tahun sudah berpengalaman dan dianggap mampu menjalankan pekerjaan dengan baik sebagai seorang Kepala Sub. Bagian.

4.3 Analisis Deskriptif

4.3.1 Audit Kinerja Sektor Publik Pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Cimahi

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 15 orang Kepala Sub Bagian Keuangan atas audit kinerja sektor publik. Untuk mendapatkan gambaran

audit kinerja sektor publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas 7 (tujuh) indikator pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Audit Kinerja Sektor Publik

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Melakukan penilaian secara independen	61	75	81,33%	Baik
2.	Ekonomi	94	150	62,67%	Cukup baik
3.	Efisiensi	96	150	64,00%	Cukup baik
4.	Efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan	120	150	80,00%	Baik
5.	Kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku	86	150	57,33%	Cukup baik
6.	Menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya	130	150	86,67%	Sangat baik
7.	Mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut	59	75	78,67%	Baik
	Total	646	900	71,78%	Baik

Perhitungan : Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011

Rekapitulasi diatas sesuai dengan indikator yang digunakan yaitu menurut Abdul Halim & Theresia (2007:71). Selain itu berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 71,78% maka dapat disimpulkan bahwa audit kinerja sektor publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi baik. Namun jika dilihat dari segi ekonomi dan efisiensi dalam hal kinerja pemerintah khususnya bendahara dikategorikan cukup, karena pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi masih terdapat bendahara yang lalai dalam menyetorkan sisa kas secara tepat jumlah (ekonomi) dan tepat waktu (efisiensi) sesuai yang diungkapkan oleh BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2008. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai audit kinerja sektor publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan tiap indikator di atas :

1) Melakukan penilaian secara independen

Indikator melakukan penilian secara independen diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden Melakuakan Penilaian Secara Independen

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Menurut Bapak/Ibu auditor dalam melakukan audit	F	0	1	2	7	5	61
		%	0	6,67%	13,33%	46,67%	33,33%	100%
Total			0	2	6	1	3	61
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 81,33%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{61}{1x5x15} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{61}{75} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 81{,}33\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 81.33%, bila merujuk pada Tabel 4.6 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden pada pertanyaan no.1 sebesar 46,67% berpendapat bahwa auditor dalam melakukan audit pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi tidak tergantung dan tidak dipengaruhi siapapun, sebesar 33,33% berpendapat bahwa auditor dalam melakukan audit sangat tidak tergantung dan tidak dipengaruhi siapapun, sebesar 13,33% responden menganggap bahwa bahwa auditor dalam melakukan audit cukup tergantung dan tidak dipengaruhi siapapun, sisanya sebesar 6,67% menganggap bahwa auditor dalam melakukan audit tergantung dan tidak dipengaruhi siapapun. Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat

diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai penilaian secara independensi termasuk dalam kategori baik. Maka sesuai dengan, independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010 : 51)

2) Ekonomi

Indikator ekonomi diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Distribusi Jawaban Responden Ekonomi

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
2	Terdapat bendahara lalai dalam menyetorkan sisa kas secara tepat jumlah	F	1	3	6	2	3	46
		%	6,67%	20,00%	40,00%	13,33%	20,00%	100%
3	Menurut Bapak/Ibu kelalaian yang biasa dilakukan oleh seorang bendahara dalam melakukan kewajibannya menyetorkan sisa kas	F	1	2	8	1	3	48
		%	6,67%	13,33%	53,33%	6,67%	20,00%	100%
	Total		2	5	14	3	6	94
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 62,67%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{94}{2x5x15} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{94}{150} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 62,67\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 62,67%, bila merujuk pada Tabel 4.7 termasuk dalam kategori cukup baik. Tanggapan responden mengenai pertanyaan no.2 sebesar 40,00% memberi pernyataan ragu-ragu, sebesar 20,00% memberikan pernyataan sangat banyak, dan 20,00% juga memberi pernyataan banyak, sebesar 13,33% responden memberi pernyataan sedikit bendahara yang lalai dalam menyetorkan sisa kas secara tepat jumlah dan sisanya sebesar 6,67% memberi pernyataan sangat banyak bendahara yang lalai dalam menyetorkan sisa kas secara tepat jumlah. Oleh karena itu, berdasarkan tanggapan responden tersebut bahwa memang benar terdapat bendahara yang lalai dalam menyetorkan sisa kas secara tepat jumlah meskipun terdapat tanggapan responden pada poin sangat sedikit atau sedikit namun hal tersebut menyatakan benar adanya bendahara yang lalai dalam menyetorkan sisa kas secara tepat jumlah.

Dengan kata lain, dengan adanya bendahara yang lalai dalam menyetorkan sisa kas secara tepat jumlah menunjukkan bahwa pemerintah tepatnya bendahara masih harus meningkatkan kinerjanya. Padahal dengan kinerja yang lebih baik yang dilakukan bendahara dalam menyetorkan sisa kas secara tepat jumlah dapat mengurangi masalah dalam hal ketepatan jumlah penerimaan daerah. Selain itu, dari tanggapan responden pada pertanyaan no.3 dalam hal kelalaian yang biasa dilakukan oleh bendahara dalam melakukan kewajiban menyetorkan sisa kas sebesar 53,33% menyatakan kelalai yang biasa dilakukan bendahara adalah menyetorkan sebagian dengan sengaja, sebesar 20,00% menyatakan bahwa menyetorkan tapi kurang tepat jumlah dan tidak menyetorkan karena ketidak

sengajaan sebesar 13,33%, serta 6,67% menyatakan menyetorkan tapi tidak tepat jumlah dan sisanya 6,67% menyatakan tidak menyetorkan dengan sengaja.

3) Efisiensi

Indikator efisiensi diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden Efisiensi

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
4	Kapan bendahara biasa menyetorkan sisa kas	F	0	3	7	4	1	48
		%	0	20,00%	46,67%	26,67%	6,66%	100%
5	Menurut Bapak/Ibu kelalaian yang pernah bendahara lakukan dalam waktu menyetorkan sisa kas	F	1	2	8	1	3	48
		%	6,67%	13,33%	53,33%	6,67%	20,00%	100%
	Total		1	5	15	5	4	96
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 64,00%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.8 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{96}{2x5x15} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{96}{150} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 64{,}00\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 64,00%, bila merujuk pada Tabel 4.8 termasuk dalam kategori cukup baik. Tanggapan responden pada pertanyaan no.4 mengenai kapan biasa bendahara menyetorkan sisa kas sebesar 46,67% memberi pernyataan saat perhitungan selesai dilaksanakan, memberikan pendapat pertengahan batas waktu penyetoran sebanyak 26,67%, sebesar 20,00%

menyatakan bendahara biasa menyetor saat menjelang akhir batas waktu penyetoran dan sisanya dengan skor 6,67% responden menyatakan bendahara biasa menyetor selalu dibatas terakhir penyetoran. Oleh karena itu, berdasarkan tanggapan responden tersebut bahwa memang benar bendahara lalai dalam menyetorkan sisa kas secara tepat waktu masih terjadi pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi ini berdasarkan jumlah responden hampir 64,00% menyatakan adanya bendahara yang lalai dalam menyetorkan sisa kas secara tepat waktu (efisiensi). Dengan kata lain, dengan masih adanya bendahara yang lalai dalam menyetorkan sisa kas secara tepat waktu (efisiensi) bahwa kinerja pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi masih kurang baik dan perlu ditingkatkan lagi. Kelalaian bendahara dalam menyetorkan sisa kas secara tepat waktu (efisiensi) ini mengakibatkan penerimaan daerah terlambat diterima. Dimana penerimaan daerah tersebut digunakan sebagai anggaran program-program yang akan dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya.

Selain itu, dari hasil tanggapan responden pada pertanyaan no.5 tentang kelalaian yang pernah bendahara lakukan dalam waktu menyetorkan sisa kas pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi sebesar 53,33% memberi tanggapan tidak menyetorkan karena ketidaksengajaan, terlambat menyetorkan sebesar 20,00%, tidak menyetor dengan sengaja sebesar 13,33%, sebesar 6,67% yaitu tidak menyetor dan sisanya sebesar 6,67% yaitu tidak menyetorkan dengan sengaja walaupun sudah dihimbau. Hal tersebut juga bisa menjelaskan bahwa masih adanya bendahara yang lalai dalam menyetorkan sisa kas dengan berbagai bentuk kelalaian pada bendahara pada saat menyetorkan sisa kas. Oleh karena itu, pada

Pemerintah Kota Cimahi masih terjadi keterlambatan penerimaan daerah yang diakibatkan lalainya bendahara dalam menyetorkan sisa kas secara tepat waktu (efisiensi). (LHP BKP-RI 2008)

4) Efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan

Indikator efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden Efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
6	Pentingnya pencapaian hasil program	F	0	0	7	2	6	59
		%	0	0	46,67%	13,33%	40,00%	100%
7	Dalam pencapaian hasil program	F	0	1	3	5	6	61
		%	0	6,67%	20,00%	33,33%	40,00%	100%
	Total		0	1	10	7	12	120
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 80,00%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.9 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{120}{2x5x15} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{120}{150} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 80,00\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 80,00%, bila merujuk pada Tabel 4.9 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden atas pertanyaan no.6 sebesar 46,67% berpendapat bahwa pencapaian

hasil program itu hanya sebagai standar penilaian kinerja, sebesar 40,00% diperoleh penilaian sangat penting dalam hal pencapaian hasil program, sisanya sebesar 13,33% responden menganggap bahwa pencapaian hasil program itu penting.

Selanjutnya dalam pertanyaan no.7 dalam hal pencapaian hasil program sebesar 40,00% memberikan tanggapan bahwa dalam hal pencapaian hasil program harus sangat tepat guna, sebesar 33,33% dalam hal pencapaian hasil program harus tepat guna, sebesar 20,00% dalam hal pencapain hasil program cukup tepat guna, dan yang terakhir sebesar 6,67% memberikan tanggapan dalam hal pencapaian hasil program sedikit tepat guna.

5) Kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku

Indikator kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden Kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
8	Terdapat ketidakpatuhan atas laporan yang diakibatkan bendahara terlambat menyetor sisa kas	F	4	2	6	2	4	40
		%	26.67%	13.33%	40.00%	13.33%	26.67%	100%
9	Menurut Bapak/Ibu terdapat bendahara yang terlambat dalam menyetorkan sisa kas	F	1	3	7	2	2	46
		%	6.67%	20.00%	46.67%	13.33%	13.33%	100%
	Total		5	5	13	4	6	86
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 57.33%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{86}{2x5x15} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{86}{150} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 57.33\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 57.33%, bila merujuk pada Tabel 4.10 termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil tanggapan responden atas pertanyaan no.8 sebesar 40,00% berpendapat bahwa cukup banyak terdapat ketidakpatuhan atas laporan yang diakibatkan bendahara terlambat menyetor sisa kas, sebesar 26,67% berpendapat bahwa sangat banyak terdapat ketidakpatuhan atas laporan yang diakibatkan bendahara terlambat menyetor sisa kas, sebesar 26,67% memberikan pendapat bahwa sangat sedikit terdapat ketidakpatuhan atas laporan yang diakibatkan bendahara terlambat menyetor sisa kas, sebesar 13,33% berpendapat bahwa banyak terdapat ketidakpatuhan atas laporan yang diakibatkan bendahara terlambat menyetor sisa kas dan sisanya sebesar 13,33% memberikan pendapat bahwa sedikit terdapat ketidakpatuhan atas laporan yang diakibatkan bendahara terlambat menyetor sisa kas.

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh tanggapan responden atas pertanyaan no.9 sebesar 46,67% menyatakan cukup sering terjadi bendahara yang terlambat dalam menyetorkan sisa kas, sebesar 20,00% menyatakan sering terjadi bendahara yang terlambat dalam menyetorkan sisa kas, serta sebesar 13,33% menyatakan masih terjadi bendahara yang terlambat dalam menyetorkan sisa kas

dan 13,33% menyatakan kadang-kadang terjadi bendahara yang terlambat dalam menyetorkan sisa kas, sisanya sebesar 6,67% menyatakan sangat sering terjadi bendahara yang terlambat dalam menyetorkan sisa kas.

6) Menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya

Indikator menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Distribusi Jawaban Responden Menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
10	Antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya	F	0	0	0	6	9	69
		%	0	0	0	40,00%	60,00%	100%
11	Menurut Bapak/Ibu kinerja yang telah dicapai tapi tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya	F	0	0	2	10	3	61
		%	0	0	13,33%	66,67%	20,00%	100%
	Total		0	0	2	16	12	130
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 86,67%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.11 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{130}{2x5x15} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{130}{150} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 86{,}67\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 86,67%, bila merujuk pada Tabel 4.11 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden pada pertanyaan no.10 sebesar 60,00% berpendapat bahwa antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sangat sesuai dan sisanya sebesar 40,00% berpendapat bahwa antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai.

Selain itu, diperoleh tanggapan pada pertanyaan no.11 mengenai kinerja yang telah dicapai tapi tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 66,67% berpendapat hampir tidak pernah terjadi kinerja yang telah dicapai tapi tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, dan 20,00% berpendapat tidak pernah terjadi kinerja yang telah dicapai tapi tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, sisanya sebesar 13.33% berpendapat bahwa pernah terjadi kinerja yang telah dicapai tapi tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

7) Mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan

Indikator mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12
Distribusi Jawaban Responden Mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
12	Apakah setiap laporan dikomunikasikan kepada pihak-pihak pengguna	F	0	0	7	2	6	59
		%	0	0	46,67%	13,33%	40,00%	100%
Total			0	0	7	2	6	59
Persentase Total Skor Tanggapan Responden =78,67 %								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.12 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{59}{1x5x15} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{59}{75} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 78,67\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 78,67%, bila merujuk pada Tabel 4.12 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden atas pertanyaan no.12 terbanyak 46,67% berpendapat bahwa kadang-kadang laporan dikomunikasikan kepada pihak-pihak pengguna, sebesar 40,00% berpendapat bahwa laporan selalu dikomunikasikan kepada pihak-pihak pengguna, sisanya sebesar 13,33% berpendapat bahwa laporan sering dikomunikasikan kepada pihak-pihak pengguna.

4.3.2 Pengawasan Fungsional Pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Cimahi

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 15 orang Kepala Sub Bagian Keuangan atas pengawasan fungsional. Untuk mendapatkan gambaran

pengawasan fungsional pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas 6 (enam) indikator pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Audit Kinerja Sektor Publik

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Pengawasan keuangan dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku	130	150	86,67%	Sangat baik
2.	Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan untuk menjamin terlaksananya tugas umum dan pembangunan pemerintahan	66	75	88,00%	Sangat baik
3.	Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat pemerintah baik secara intern maupun ekstern sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	101	150	67,33%	Cukup baik
4.	Pengawasan fungsional dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran	46	75	61,33%	Cukup baik
5.	Pengawasan fungsional di Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	59	75	78,67%	Baik
6.	Pengawasan fungsional ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna	132	150	88,00%	Sangat baik
	Total	534	675	79,11%	Baik

Perhitungan : Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden
Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011

Rekapitulasi diatas sesuai dengan indikator yang digunakan yaitu menurut Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pasal 1. Selain itu berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 79,11% maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi baik. Namun jika dilihat dari segi pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah baik secara intern maupun ekstern sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal pengawasan fungsional yang dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi pada umumnya belum sepenuhnya memenuhi kriteria standar yang baik yang telah ditentukan di dalam kajian atas teori setiap indikator. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai pengawasan fungsional pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan tiap indikator di atas :

1) Pengawasan keuangan dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

Indikator pengawasan keuangan dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.14
Distribusi Jawaban Responden Pengawasan keuangan dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
13	Pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pengawas dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku	F	0	0	0	6	9	69
		%	0	0	0	40,00%	60,00%	100%
14	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pengawas	F	0	0	2	10	3	61
		%	0	0	13,33%	66,67%	20,00%	100%
Total			0	0	2	16	12	130
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 86,67 %								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.14 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{130}{2x5x15} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{130}{150} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 86{,}67\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 86,67%, bila merujuk pada Tabel 4.14 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden pada pertanyaan no.13 sebesar 60,00% berpendapat sangat setuju, dan sisanya sebesar 40,00% menyatakan pendapat setuju bahwa pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pengawas dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh penilaian mengenai pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pengawas pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi pada pertanyaan no.14 sebesar 66,67% responden berpendapat bahwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebesar 20,00% berpendapat bahwa pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pengawas sudah sangat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sisanya 13,33% menganggap bahwa pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pengawas cukup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan untuk menjamin terlaksananya tugas umum dan pembangunan pemerintahan

Indikator Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan untuk menjamin terlaksananya tugas umum dan pembangunan pemerintahan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.15
Distribusi Jawaban Responden Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan untuk menjamin terlaksananya tugas umum dan pembangunan pemerintahan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
15	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota yang diarahkan untuk menjamin terlaksananya tugas umum dan pembangunan pemerintahan	F	0	0	1	7	7	66
		%	0	0	6,66%	46,67%	46,67%	100%
Total		F	0	0	1	7	7	66
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 88.00%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.15 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{66}{1x5x15} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{66}{75} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 88{,}00\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 88,00%, bila merujuk pada Tabel 4.15 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden atas pertanyaan no.15 sebesar 46,67% berpendapat sudah sangat sesuai, sebesar 46,67% berpendapat sudah sesuai, sisanya sebesar 6,67% berpendapat bahwa pelaksanaan pengawasan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota yang diarahkan untuk menjamin terlaksananya tugas umum dan pembangunan pemerintahan sudah cukup sesuai.

3) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat pemerintah baik secara intern maupun ekstern sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Indikator pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat pemerintah baik secara intern maupun ekstern sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.16
Distribusi Jawaban Responden Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat pemerintah baik secara intern maupun ekstern sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
16	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota dalam mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran	F	0	1	2	7	5	61
		%	0	6,67%	13,33%	46,67%	33,33%	100%
	Total		4	3	8	8	7	61
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 81,33%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.16 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{61}{1x5x15} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{61}{75} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 81,33\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 81,33%, bila merujuk pada Tabel 4.16 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden pada pertanyaan no.16 sebesar 46,67% berpendapat sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku, sebesar 33,33% berpendapat sangat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebesar 13,33% berpendapat cukup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan sisanya sebesar 6.67% berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota dalam mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pengawasan fungsional dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran

Indikator Pengawasan fungsional dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.17
Distribusi Jawaban Responden Pengawasan fungsional dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
17	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota dalam mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran	F	4	2	6	1	2	40
		%	26,67%	13,33%	40,00%	6,67%	13,33%	100%
18	Penyimpangan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung	F	1	3	7	2	2	46
		%	6,67%	20,00%	46,67%	13,33%	13,33%	100%
	Total		4	3	8	8	7	86
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 57,33%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.17 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{86}{2x5x15} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{86}{150} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 57{,}33\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 57,33%, bila merujuk pada Tabel 4.17 termasuk dalam kategori cukup baik. Tanggapan responden pada pertanyaan no.17 sebesar 40,00% responden berpendapat sedikit membantu pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota dalam mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran. sebesar 26,67% berpendapat tidak cukup membantu, sebesar 13,33% responden menyatakan cukup membantu , sebesar 13,33% responden menyatakan

biasa saja, dan sisanya sebesar 6,67% responden menyatakan sedikit membantu pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota dalam mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran.

Selain itu, bila dikaji lebih pada pertanyaan no.18 tanggapan responden sebesar 46,67% berpendapat bahwa cukup sering terjadi penyimpangan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung, sebesar 20,00% responden menyatakan sering terjadi, sebesar 13,33% menyatakan masih terjadi, sebesar 13,33% menyatakan kadang-kadang terjadi penyimpangan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung, dan sisanya sebesar 6,67% menyatakan sangat sering terjadi penyimpangan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung.

Berdasarkan tanggapan responden diatas dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota dalam mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran ini menunjukkan bahwa sedikit membantu atau bahkan tidak cukup membantu dalam mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran. Ketidak cukup membantu dalam mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran ini sehingga masih ditemukan penyimpangan–penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan. Padahal dengan adanya

pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota dapat mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, berdasarkan tanggapan responden tersebut bahwa memang benar pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota dalam mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi tidak cukup membantu karena memang masih ditemukan penyimpangan–penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung. (LHP BPK-RI 2008)

5) Pengawasan fungsional di Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Indikator pengawasan fungsional di Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.18
Distribusi Jawaban Responden Pengawasan Fungsional di Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
19	Bagaimana pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah di Pemerintah daerah Bapak/Ibu	F	0	0	7	2	6	59
		%	0	0	46,67%	13,33%	40,00%	100%
	Total		0	0	7	2	6	59
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 78.67%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.18 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{59}{1x5x15} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{59}{75} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 78,67\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 78,67%, bila merujuk pada Tabel 4.18 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden pada pertanyaan no.19 sebesar 46,67% responden berpendapat bahwa pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah pada di Pemerintah Daerah Bapak/Ibu khususnya pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebesar 40.00% berpendapat sudah sangat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sisanya sebesar 13.33% menyatakan bahwa pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah pada di Pemerintah Daerah Bapak/Ibu khususnya pada SKPD di Pemerintah Kota

Cimahi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil tanggapan responden tersebut diatas bahwa pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah pada di Pemerintah Daerah Bapak/Ibu khususnya pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah baik.

6) Pengawasan fungsional ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna

Indikator pengawasan fungsional ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.19
Distribusi Jawaban Responden Pengawasan Fungsional ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
20	Maksud dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna	F	0	0	2	5	8	66
		%	0	0	13,33%	33,33%	53,34%	100%
21	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota dalam menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna	F	0	0	1	7	7	66
		%	0	0	6,66%	46,67%	46,67%	100%
	Total		0	0	3	12	15	132
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 88,00%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.19 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{132}{2x5x15} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{132}{150} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 88{,}00\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 88,00%, bila merujuk pada Tabel 4.19 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden pada pertanyaan no.20 mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sebesar 53,34% responden berpendapat sudah sangat sesuai, sebesar 33,33% berpendapat sudah sesuai, dan sisanya sebesar 13.33% menyatakan bahwa cukup sesuai pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dari hasil tanggapan responden tersebut diatas bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sudah sesuai dan bisa dinilai sudah baik.

Apabila dikaji lebih dalam pada pertanyaan no.21 mengenai penilaian pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sebesar 46.67% responden berpendapat sangat membantu, sebesar 46.67% yang memberikan pendapat cukup membantu, dan sisanya sebesar 6.67% memberikan pendapat pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Itwilprov, Itwilkab atau kota

ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna pada indikator ini sedikit membantu.

4.3.3 Akuntabilitas Publik Pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Cimahi

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 15 orang Kepala Sub Bagian Keuangan atas akuntabilitas publik. Untuk mendapatkan gambaran akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas 4 (empat) indikator pada tabel berikut :

Tabel 4.20
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Akuntabilitas Publik

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	**Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and llegality*)** **Akuntabilitas program (*program accountability*)**	**107**	**150**	**71,33%**	**Baik**
2	**Akuntabilitas proses (*proccess accountability*)**	**70**	**75**	**93,33%**	**Sangat baik**
3	**Akuntabilitas program (*program accountability*)**	**180**	**300**	**60,00%**	**Cukup baik**
4	**Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)**	**61**	**75**	**81,33%**	**Baik**
	Total	**418**	**600**	**69,67%**	**Baik**

Perhitungan= Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden
Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011

Rekapitulasi diatas sesuai dengan indikator yang digunakan yaitu menurut Mardiasmo (2002:21). Selain itu berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 69,67% maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi baik. Namun pada segi akuntabilitas program masih dikategorikan cukup baik, karena terdapat tidak adanya laporan

pertanggungjawaban atas program atau kegiatan yang dilaksanakan. Padahal dengan adanya laporan pertanggungjawaban atas program atau kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui apakah dana pada program atau kegiatan tersebut telah digunakan sesuai dengan tujuannya dan apakah seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan. Tetapi pada kenyataannya, laporan pertanggungjawaban tersebut tidak ada, hal ini pun dijelaskan bahwa kelalain tersebut disebabkan oleh bagian keuangan Pemkot Cimahi lalai meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana *role sharing*. (LHP BKP-RI 2008)

Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai pelaksanaan akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan tiap indikator di atas :

1) Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and llegality*)

Indikator Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and llegality*) diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.21
Distribusi Jawaban Responden Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and llegality*)

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
22	Menurut Bapak/Ibu pertanggungjawaban kejujuran dan pertanggungjawaban hukum dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan	F	3	1	6	2	3	46
		%	20,00%	6,67%	40,00%	13,33%	20,00%	100%
23	Menurut Bapak/Ibu bagaimana kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dalam penggunaan sumber dana publik	F	0	0	2	10	3	61
		%	0	0	13,33%	66,67%	20,00%	100%
	Total		3	1	8	12	6	107
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 71,33%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.21 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{107}{2x5x15} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{107}{150} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 71{,}33\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 71,33%, bila merujuk pada Tabel 4.21 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden pada pertanyaan no.22 mengenai pertanggungjawaban kejujuran dan pertanggungjawaban hukum dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan sebesar 40,00% menyatakan sedikit membantu, 20,00% menyatakan sangat membantu, selanjutnya tanggapan responden yang menyatakan tidak cukup membantu sebesar 20,00%, sebesar 13,33% menyatakan cukup membantu, dan sisanya 6,67% menyatakan biasa saja.

Dapat dianalisa pula pada pertanyaan no.23 mengenai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dalam penggunaan sumber dana publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi sudah patuh dengan tanggapan responden 66,67%, sebesar 20,00% menyatakan sangat patuh, dan sisanya sebesar 13,33% menyatakan cukup patuh. Oleh karena itu, hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dalam penggunaan sumber dana publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi sudah baik dan sesuai dengan ketentuan. Maka tanggapan responden mengenai pertanggungjawaban kejujuran dan pertanggungjawaban hukum dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan sebesar 71,33% dapat disimpulkan sudah baik.

2) Akuntabilitas proses (*proccess accountability*)

Indikator Akuntabilitas proses (*proccess accountability*) diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.22
Distribusi Jawaban Responden Akuntabilitas proses (*proccess accountability*)

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
24	Prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi	F	0	0	0	5	10	70
		%	0	0	0	33,33%	66,67%	100%
Total			0	0	0	5	10	70
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 93,33%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.22 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{70}{1x5x15} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{70}{75} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 93{,}33\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 93,33%, bila merujuk pada Tabel 4.22 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden atas pertanyaan no.24 sebesar 66,67% berpendapat bahwa prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi sudah sangat baik, dan sisanya sebesar 33,33% berpendapat bahwa prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi sudah baik. Maka tanggapan responden sebesar 93,33% menyatakan bahwa sudah sangat baik prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3) Akuntabilitas program (*program accountability*)

Indikator Akuntabilitas program (*program accountability)* diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.23
Distribusi Jawaban Responden Akuntabilitas program (*program accountability*)

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
25	Menurut Bapak/Ibu tidak adanya laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana	F	1	3	7	2	2	46
		%	6,67%	20,00%	46,67%	13,33%	13,33%	100%
26	Pelaksanaan program yang ditetapkan di SKPD telah mencapai kondisi	F	1	3	7	2	2	46
		%	6,67%	20,00%	46,67%	13,33%	13,33%	100%
27	Dalam pelaksanaan program yang baik adalah	F	4	2	6	1	2	40
		%	26,67%	13,33%	40,00%	6,67%	13,33%	100%
28	Terdapat kelalaian dalam laporan pertanggungjawaban	F	1	2	8	1	3	48
		%	6,67%	13,33%	53,33%	6,67%	20,00%	100%
	Total	F	7	10	28	6	9	180
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 60,00%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.23 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{180}{4x5x15} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{180}{300} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 60{,}00\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 60,00%, bila merujuk pada Tabel 4.23 termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil tanggapan responden pada pertanyaan no.25 sebesar 46,67% menyatakan bahwa sering terjadi, sebesra 20,00% menyatakan selalu terjadi, sebesar 13,33% menyatakan jarang terjadi, tanggapan responden yang menyatakan cukup sering terjadi sebesar 13,33% dan sisanya sebesar 6,67% menyatakan sangat sering terjadi. Selanjutnya tanggapan responden pada pertanyaan no.26 mengenai pelaksanaan program yang ditetapkan di SKPD sebesar 46,67% menyatakan program tercapai 75% - 80% sama dengan yang ditetapkan, sebesar 20,00% menyatakan program tercapai 60%

- 75% sama dengan yang ditetapkan, sebesar 13,33% menyatakan program tercapai 100% sama dengan yang ditetapkan, tanggapan responden yang menyatakan program tercapai 80% - 95% sama dengan yang ditetapkan sebesar 13,33%, dan sisanya sebesar 6,67% menyatakan program tercapai 45% - 60% sama dengan yang ditetapkan. Dari tanggapan responden pada pertanyaan no.25 mengenai tidak adanya laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana menyatakan sebesar 46.67% bahwa sering terjadi tidak adanya laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI 2008 bahwa tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang mengakibatkan belum dapat diketahui apakah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan tujuannya dan apakah seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Selanjutnya hal tersebut diperjelas dengan tanggapan pada pertanyaan no.27 mengenai dalam pelaksanaan program yang baik tanggapan responden sebesar 40,00% menyatakan bahwa program mencapai hasil yang optimal saja, sebesar 26,67% menyatakan bahwa program asal terlaksana, dan sebesar 13,33% menyatakan program mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang minimal, sebesar 13,33% program biasa saja, dan sisangya sebesar 6,67% program mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang maximal. Dalam pelaksanaan program yang baik seharusnya program mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Dapat dianalisa pula pada pertanyaan no.28 dimana hasil tanggapan responden mengenai terdapat kelalaian dalam laporan pertanggungjawaban

sebesar 53,33% menyatakan bahwa sering terjadi, sebesar 20,00% menyatakan bahwa jarang terjadi, sebesar 13,33% memberikan pendapat selalu terjadi, dan memberikan pendapat cukup sering terjadi sebesar 6,67%, dan sisanya 6,67% memberikan pendapat sangat jarang terjadi. Dengan demikian, dapat dipahami dari hasil tanggapan responden mengenai terdapat kelalaian dalam laporan pertanggungjawab yang sering terjadi sesuai pada kenyatanyaannya bahwa tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang mengakibatkan belum dapat diketahui apakah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan tujuannya dan apakah seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan, hal ini disebabkan bagian keuangan Pemkot Cimahi lalai meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana *role sharing.* (LHP BPK-RI 2008)

Padahal dengan adanya laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diketahui apakah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan tujuannya dan apakah seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan.

4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Indikator Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability)* diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.24
Distribusi Jawaban Responden Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
29	Pertanggungjawaban pemerintah pusat atau daerah	F	0	0	2	10	3	61
		%	0	0	13,33%	66,67%	20,00%	100%
Total		F	0	0	2	10	3	61
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 81,33%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.24 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{61}{1x5x15} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{61}{75} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 81{,}33\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 81,33%, bila merujuk pada Tabel 4.24 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden atas pertanyaan no.29 sebesar 66,67% menyatakan bahwa pertanggungjawaban pemerintah pusat atau daerah hanya kepada DPR/DPRD saja, sebesar 20,00% menyatakan bahwa pertanggungjawaban pemerintah pusat atau daerah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas, dan sisanya sebesar 13,33% menyatakan bahwa pertanggungjawaban pemerintah pusat atau daerah hanya kepada masyarakat luas saja. Maka dalam akuntabilitas kebijakan dapat disimpulkan bahwa pada SKPD di Pemerinatah Kota Cimahi pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat masih kurang dan perlu ditingkatkan.

4.4 Analisis Verifikatif

Setelah diuraikan gambaran data variabel penelitian, selanjutnya untuk menguji pengaruh audit kinerja dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik maka dilakukan pengujian statistik baik secara simultan maupun parsial, namun sebelum data audit kinerja, pengawasan fungsional, dan akuntabilitas publik diolah terlebih dahulu dikonversi menjadi data interval menggunakan *Method Succesive Interval*. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut, pengujian uji asumsi klasik, analisis regresi linier, koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan software *SPSS 15 for windows* dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini :

1) Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regressi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini hanya tiga asumsi yang disebutkan diatas tersebut diuji karena data yang dikumpulkan tidak mengandung unsur deret waktu maka tidak dilakukan uji autokorelasi.

a. Hasil Pengujian Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan,

karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi.

Tabel 4.25
Hasil Uji Normalitas Taksiran Model Regresi X –Y

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

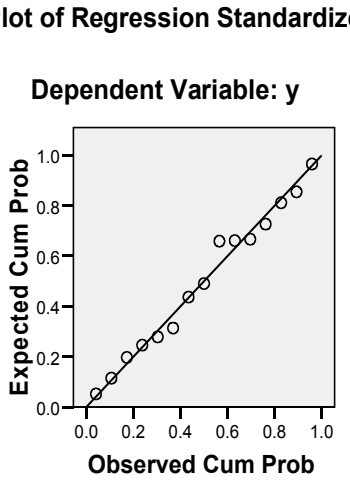
		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,40064015
Most Extreme Differences	Absolute	,137
	Positive	,100
	Negative	-,137
Kolmogorov-Smirnov Z		,532
Asymp. Sig. (2-tailed)		,940

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.25 dapat dilihat nilai probabilitas (sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,940. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal. Secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1
Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas)

Grafik diatas mempertegas bahwa model regressi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal.

b. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.26
Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,998	1,002
	X2	,998	1,002

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011

Melalui nilai VIF yang diperoleh seperti pada Tabel 4.26 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas masih lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

c. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error). Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.27 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error).

Tabel 4.27
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

			absolut_error
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	-.182
		Sig. (2-tailed)	.516
		N	15
	X2	Correlation Coefficient	.011
		Sig. (2-tailed)	.970
		N	15

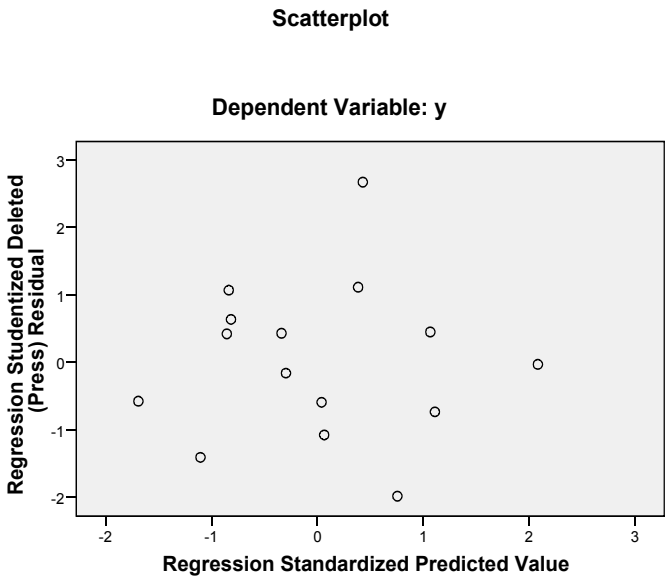
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.27 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), dimana nilai signifikansi (sig) dari masing-masing koefisien korelasi kedua variabel bebas dengan nilai absolut error (0,516 dan 0,970) masih lebih besar dari 0,05.

Selain itu cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat pula dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. Analisis pada gambar Scatterplot yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika :

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.

Hasil pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2
Grafik Uji Heterokedastisitas

Diperoleh titik-titik data tersebar di atas dan dibawah 0, sehingga disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada persamaan regresi yang diperoleh.

2) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk melakukan prediksi, perubahan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen naik atau turun nilainya. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan karena variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu dua variabel independen yaitu audit kinerja sektor publik sebagai variabel X_1 dan pengawasan fungsional sebagai variabel X_2 dan satu variabel dependen yaitu akuntabilitas publik.

Sehingga dapat diketahui dan dibuktikan sejauh mana hubungan audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik. Dalam perhitungannya penulis menggunakan dua cara yaitu manual dan komputerisasi. Cara perhitungan komputerisasi dengan menggunakan media program komputer yaitu *SPSS 15 for windows* dan diperoleh hasil output sebagai berikut :

Tabel 4.28
Hasil Perhitungan Koefisien Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,585	,773		-,756	,464
	X1	,525	,217	,445	2,415	,033
	X2	,730	,221	,608	3,300	,006

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011

Dari tabel diatas dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = -0{,}585 + 0{,}525\ X_1 + 0{,}730\ X_2}$$

Dimana :

Y = Akuntabilitas Publik

X_1 = Audit Kinerja

X_2 = Pengawasan Fungsional

Nilai konstanta (a) sebesar -0,585 menunjukkan nilai rata-rata akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi apabila audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional tidak dilaksankan dengan baik. Kemudian nilai koefisien regresi (b_1) sebesar 0,525 menunjukkan peningkatan akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi apabila audit kinerja ditingkatkan sebesar satu satuan. Kemudian nilai koefisien regresi (b_2) sebesar

0,730 menunjukkan peningkatan akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi apabila pengawasan fungsional ditingkatkan sebesar satu satuan.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin tinggi audit kinerja dan pengawasan fungsional diduga akan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi. Sebaliknya, semakin rendah audit kinerja dan pengawasan fungsional diduga akan menurunkan akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi.

4.4.1 Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik (X_1) dan Pengawasan Fungsional (X_2) Terhadap Akuntabilitas Publik (Y) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi Secara Parsial

Perhitungan secara parsial yaitu sebagai berikut :

1. Korelasi antara Audit Kinerja dengan Akuntabilitas Publik ketika Pengawasan Fungsional tidak berubah rumusnya adalah sebagai berikut :

$$r_{x_1 y} = \frac{n(\sum X_1 Y) - (\sum X_2 \sum Y)}{\sqrt{[n\sum X_1^2 - (\sum X_1)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$r_{X1Y} = \frac{33{,}43222}{70{,}37472}$$

$$\mathbf{r_{X1Y} = 0{,}475}$$

2. Korelasi antara Pengawasan Fungsional dengan Akuntabilitas Publik ketika Audit Kinerja tidak berubah rumusnya adalah sebagai berikut :

$$r_{x_2y} = \frac{n(\sum X_2 Y) - (\sum X_2 \sum Y)}{\sqrt{[n\sum X_2^{\,2} - (\sum X_2)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$r_{X2Y} = \frac{43{,}52526}{69{,}10369}$$

$$\mathbf{r_{X2Y} = 0{,}630}$$

3. Korelasi antara Audit Kinerja dengan Pengawasan Fungsional ketika Akuntabilitas Publik tidak berubah rumusnya adalah sebagai berikut :

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$r_{x_1x_2} = \frac{n(\sum X_1 X_2) - (\sum X_1 \sum X_2)}{\sqrt{[n\sum X_1^{\,2} - (\sum X_1)^2][n\sum X_2^{\,2} - (\sum X_2)^2]}}$$

$$r_{X1X2} = \frac{2{,}92212595}{58{,}57237}$$

$$\mathbf{r_{X1X2} = 0{,}050}$$

Maka setelah itu dapat menghitung korelasi (*r*) dengan perhitungan sebagai berikut :

4.4.1.1 Pengaruh Audit Kinerja (X_1) Terhadap Akuntabilitas Publik (Y) Pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Cimahi

Koefisien korelasi Audit Kinerja Sektor Publik dengan Akuntabilitas Publik di peroleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$r_{x_1 y} = \frac{r_{x_1 y} - r_{x_2 y}\, r_{x_1 x_2}}{\sqrt{[1 - r_{x_2 y}^2][1 - r_{x_1 x_2}^2]}}$$

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$r_{YX1.X2} = \frac{0{,}44363708}{0{,}775746089}$$

$$\mathbf{r_{YX1.X2} = 0{,}572}$$

Perhitungan tersebut di atas juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi yaitu *SPSS 15 for windows* sebagai berikut :

Tabel 4.29
Koefisien Korelasi Parsial Audit Kinerja dan Akuntabilitas Publik

Correlations

Control Variables			Y	X1
X2	Y	Correlation	1.000	.572
		Significance (2-tailed)	.	.033
		df	0	12
	X1	Correlation	.572	1.000
		Significance (2-tailed)	.033	.
		df	12	0

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011

Hubungan antara audit kinerja dengan akuntabilitas publik ketika pengawasan fungsional tidak berubah adalah sebesar 0,572 dengan arah positif. Artinya keterkaitan audit kinerja dengan akuntabilitas publik sedang ketika pengawasan fungsional tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa

ketika audit kinerja meningkat, sementara pengawasan fungsional tidak berubah maka akan meningkatkan akuntabilitas publik. Kemudian besar pengaruh audit kinerja dengan akuntabilitas publik ketika pengawasan fungsional tetap adalah $(0,572)^2 \times 100\% = 32,72\%$.

4.4.1.2 Pengaruh Pengawasan Fungsional (X_2) Terhadap Akuntabilitas Publik (Y) Pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Cimahi

Koefisien korelasi Pengawasan Fungsional dengan Akuntabilitas Publik diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$rx_2y = \frac{rx_2y - rx_1y \; rx_1x_2}{\sqrt{[1 - rx_1y^2][1 - rx_1{x_2}^2]}}$$

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$r_{X2.Y} = \frac{0,606153991}{0,878857665}$$

$$r_{X2.Y} = \mathbf{0,690}$$

Perhitungan tersebut di atas juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi yaitu *SPSS 15 for windows* sebagai berikut :

Tabel 4.30
Koefisien Korelasi Parsial Pengawasan Fungsioanl dengan Akuntabilitas Publik

Correlations

Control Variables			Y	X2
X1	Y	Correlation	1.000	.690
		Significance (2-tailed)	.	.006
		df	0	12
	X2	Correlation	.690	1.000
		Significance (2-tailed)	.006	.
		df	12	0

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011

Hubungan antara pengawasan fungsional dengan akuntabilitas publik ketika audit kinerja tidak berubah adalah sebesar 0,690 dengan arah positif. Artinya keterkaitan pengawasan fungsional dengan akuntabilitas publik kuat ketika audit kinerja tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika pengawasan fungsional meningkat, sementara audit kinerja tidak berubah maka akan meningkatkan akuntabilitas publik. Kemudian besar pengaruh pengawasan fungsional dengan akuntabilitas publik ketika audit kinerja tetap adalah $(0,690)^2 \times 100\% = 47,61\%$.

4.4.2 Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik (X_1) dan Pengawasan Fungsional (X_2) Terhadap Akuntabilitas Publik (Y) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi Secara Simultan

Perhitungan secara simultan yaitu sebagai berikut :

1) Koefisien Korelasi Simultan Audit Kinerja dan Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik

Korelasi simultan merupakan angka yang menunjukan kekuatan hubungan antar kedua variabel bebas secara bersama-sama dengan variable akuntabilitas publik. Hubungan korelasi secara simultan dapat dilihat sebagai berikut :

$$r_{12}y = \sqrt{\frac{ry_1^2 + ry_2^2 - 2ry_1.ry_2.r_{12}}{(1 - r_{12}^2)}}$$

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$r_{X12.Y} = \frac{0{,}769768106}{0{,}998754761}$$

$$\mathbf{r_{X12.Y} = 0{,}771}$$

Perhitungan tersebut di atas juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi yaitu *SPSS 15 for windows* sebagai berikut :

Tabel 4.31
Model summary untuk korelasi X_1 dan X_2 terhadap Y pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.771[a]	.594	.526	.43274

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan data pada tabel 4.31 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi ganda adalah sebesar 0,771 yang berada antara 0,60 – 0,799, artinya audit kinerja dan pengawasan fungsional secara simultan memiliki hubungan yang kuat dengan akuntabilitas publik.

2) Koefisien Determinasi

Nilai korelasi *r* hanya menyatakan erat atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen (variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Y), digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi diperoleh koefisien determinasi sebagai berikut :

$Kd = r^2 \times 100\ \%$

$Kd = (0{,}771)^2 \times 100\ \%$

$Kd = 0{,}594441 \times 100\%$

$Kd = 59.4441$

Kd = 59.4 % (Pembulatan)

Sedangkan hasil perhitungan dengan menggunakan *SPSS 15* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.32
Analisis Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.771[a]	.594	.526	.43274

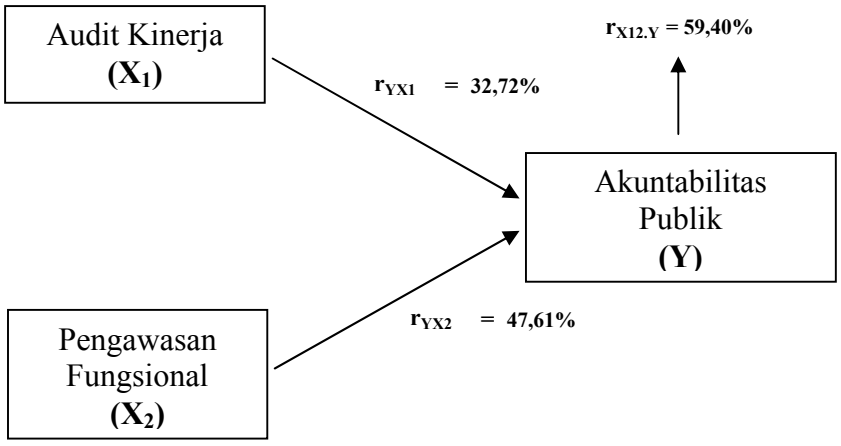
a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011

Nilai R pada tabel 4.32 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel bebas (Audit Kinerja dan Pengawasan Fungsional) secara simultan dengan Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan kedua variabel bebas (Audit Kinerja dan Pengawasan Fungsional) memiliki hubungan yang kuat dengan Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berganda (R) sebesar 0771 berada diantara 0,60 hingga 0,799 yang tergolong dalan kriteria korelasi kuat.

Sementara nilai R-Square sebesar 0,594 atau 59,40%, menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yang terdiri dari Audit Kinerja dan Pengawasan Fungsional secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada Akuntabilitas Publik sebesar 59,40%. Dengan kata lain secara bersama-sama kedua variabel bebas (Audit Kinerja dan Pengawasan Fungsional) memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 59,40% terhadap perubahan Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah sebesar 40,60%, dan merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel bebas (Audit Kinerja dan Pengawasan Fungsional) seperti pelayanan publik, kualitas informasi keuangan, dan manajerial.



Gambar 4.3
Diagram Dan Koefisien Korelasi Pengaruh Audit Kinerja dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik

Selanjutnya dilakukan pengujian apakah Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi, baik secara parsial maupun bersama-sama (simultan). Uji signifikansi dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih eksak atas interpretasi dari masing-masing koefisien regressi. Pengujian dimulai dari pengujian parsial, dan dilanjutkan dengan uji simultan.

3) Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Pada pengujian koefisien regresi secara parsial akan diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,178 yang diperoleh dari tabel t pada α

= 0,05 dan derajat bebas 12 untuk pengujian dua pihak. Nilai statistik uji t yang digunakan pada pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.33
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.585	.773		-.756	.464
	X1	.525	.217	.445	2.415	.033
	X2	.730	.221	.608	3.300	.006

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011

Nilai statistik uji t yang terdapat pada tabel 4.33 selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} untuk menentukan apakah variabel yang sedang diuji berpengaruh signifikan atau tidak.

1. Pengaruh Audit Kinerja Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Publik

Untuk menguji pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \beta_1 = 0$: Audit kinerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi.

$H_a : \beta_1 \neq 0$: Audit kinerja secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi.

b) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0,05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 15-2-1= 12, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,178.

c) Mencari nilai t_{hitung}

Nilai t_{hitung} dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut :

$$t_1 = r_1 y \sqrt{\frac{n-k-1}{(1-r_1 y^2)}}$$

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$t_1 = \frac{1{,}9811}{0{,}8203}$$

$$\boldsymbol{t_1 = 2{,}415}$$

Dengan bantuan software SPSS.15, seperti terlihat pada tabel 4.33 sama halnya dengan manual diperoleh nilai t_{hitung} variabel Audit Kinerja sebesar **2,415.**

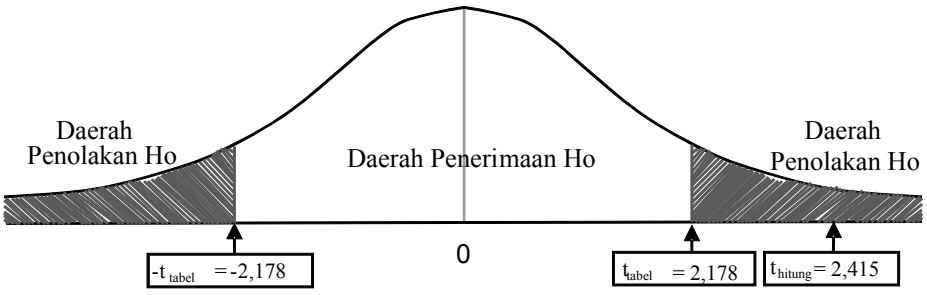
d) Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Dari keluaran software SPSS seperti terlihat pada tabel 4.33 diperoleh nilai t_{hitung} variabel Audit Kinerja sebesar 2,415 dengan nilai signifikansi sebesar 0,033. Karena nilai t_{hitung} (2,415) > t_{tabel} (2,178), maka pada tingkat kekeliruan 5% sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan audit kinerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi. Arah pengaruh bertanda positif menunjukkan bahwa kenaikkan audit kinerja cenderung meningkatkan

akuntabilitas publik. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.4
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan H_o Pada Uji t (Audit Kinerja)

e) Pengambilan keputusan hipotesis

Hipotesis yang menyatakan bahwa Audit Kinerja Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi telah terbukti melalui pengujian hipotesis. Melalui uji-t dengan tingkat kekeliruan 5% (α =0.05), diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan Audit Kinerja Sektor Publik tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik (H_0) ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi.

Besarnya pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik secara parsial adalah 32,72%, artinya sebesar 32,72% kenaikan Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi dapat dijelaskan oleh peningkatan Audit Kinerja Sektor Publik ketika Pengawasan Fungsional tetap. Penelitian ini mendukung

hipotesis yang diajukan bahwa Audit Kinerja Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan I Gusti Agung Rai bahwa manfaat utama audit kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas publik. Dengan didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anna Sumaryati & Andreas Lako (2003) menyatakan bahwa peran strategi audit kinerja sektor publik antara lain salah satunya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

2. Pengaruh Pengawasan Fungsional Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Publik

Untuk menguji pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Merumuskan hipotesis statistik

Hipotesis kedua

$H_0 : \beta_2 = 0$: Pengawasan fungsional secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi.

$H_a : \beta_2 \neq 0$: Pengawasan fungsional secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi.

b) Menentukan tingkat signifikasi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 15-2-1= 12, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,178.

c) Mencari nilai t_{hitung}

Nilai t dapat di cari dengan persamaan sebagai berikut :

$$t_2 = r_{2y}\sqrt{\frac{n-k-1}{(1-r_{2y}^2)}}$$

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$t_2 = \frac{2,3892}{0,7241}$$

$$\mathbf{t_2 = 3,300}$$

Dengan bantuan software SPSS.15, seperti terlihat pada tabel 4.33 sama halnya dengan manual diperoleh nilai t_{hitung} variabel pengawasan fungsional sebesar **3,300.**

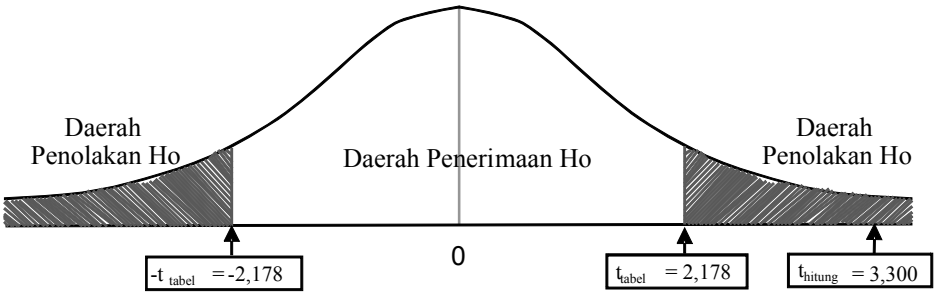
d) Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Dari keluaran software SPSS seperti terlihat pada tabel 4.33 diperoleh nilai t_{hitung} variabel Pengawasan Fungsional sebesar 3,300 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006. Karena nilai t_{hitung} (3,300) > t_{tabel} (2,178), maka pada tingkat kekeliruan 5% sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan pengawasan fungsional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi. Arah pengaruh bertanda positif menunjukkan bahwa kenaikkan pengawasan fungsional cenderung meningkatkan akuntabilitas publik. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.5
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan H_o Pada Uji t
(Pengawasan Fungsional)

e) Pengambilan keputusan hipotesis

Hipotesis yang menyatakan bahwa Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi telah terbukti melalui pengujian hipotesis. Melalui uji-t dengan tingkat kekeliruan 5% (α =0.05), diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan Pengawasan Fungsional tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik (H_0) ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi.

Besarnya pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik secara parsial adalah 47,61%, artinya sebesar 47,61% kenaikan Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota

Cimahi dapat dijelaskan oleh peningkatan Pengawasan Fungsional ketika Audit Kinerja Sektor Publik tetap. Penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan bahwa Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deddy Supardi dan Sherly Wiranty (2010) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional yang akan menunjang akuntabilitas publik.

b. Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Pengujian secara simultan bertujuan untuk membuktikan apakah Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

a) Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara audit kinerja dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara audit kinerja dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi.

b) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0,05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (k; n-k-1) df= 2;12. Pada tabel F untuk df_1= 2, df_2=12, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,885.

c) Mencari nilai F_{hitung}

Nilai F_{hitung} dapat di cari dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Dimana :
R = koefisien kolerasi ganda

K = jumlah variabel independen

n = jumlah anggota sampel

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{7{,}128256957}{0{,}811957174}$$

$$\mathbf{F_{hitung}} = \mathbf{8{,}779}$$

Perhitungan tersebut di atas juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi dengan *SPSS 15 for windows* yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.34
Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.288	2	1.644	8.779	.004[a]
	Residual	2.247	12	.187		
	Total	5.535	14			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber:Data Primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.34 di atas dapat dilihat nilai F_{hitung} hasil pengolahan data sebesar 8,779.

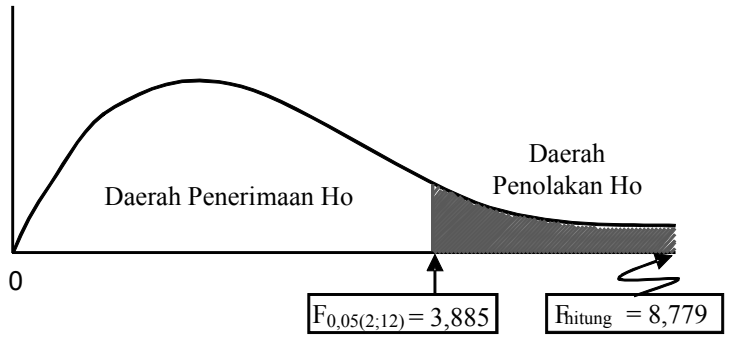
d) Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $F_{hitung} < F_{tabel,}$ maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ (8,779 > 3,885), maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti kedua variabel bebas, yaitu audit kinerja dan pengawasan fungsional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Dari tabel Anova diatas diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,004, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah Ho ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.6
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan H_o Pada Uji Simultan

e) Pengambilan keputusan hipotesis

Hipotesis yang menyatakan bahwa Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi telah terbukti melalui pengujian hipotesis. Melalui uji-F dengan tingkat kekeliruan 5% (α=0.05), diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional secara simultan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik (H_0) ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Publik. Besarnya pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik adalah sebesar 59,4%. Artinya 59,4% perubahan Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi dapat dijelaskan oleh variabel Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional, sedangkan sisanya sebesar 40,60% dipengaruhi faktor lain seperti pelayanan publik, kualitas informasi keuangan, dan manajerial. (Deddy&Sherly, 2010)